



Analisis *Discourse Network* di China, India, dan Indonesia

Haroen Al Rasyid

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Indonesia.

Penulis Korespondensi: Haroen.rasyid@students.paramadina.ac.id

Abstract. *This study analyzes actors and discourse networks surrounding disinformation and foreign intervention in Indonesia, India, and China using the Discourse Network Analysis (DNA) approach. The study aims to identify dominant actors, map relationships among actors, and examine differences in discourse structures within distinct political and public-space contexts. The research data consist of 200 national and international news articles discussing disinformation and foreign intervention, which were coded based on actors, issues, and their positions toward specific discourse claims. The findings indicate that government actors are the most dominant and occupy central positions within the discourse networks across the three countries. Governments play a significant role in framing disinformation and foreign intervention as security issues and threats to political stability and information sovereignty. Technology companies and media organizations function as amplifiers and intermediaries by connecting different groups of actors and facilitating the dissemination of competing narratives. Meanwhile, civil society organizations, academics, fact-checking organizations, and independent media form counter-discourse clusters that challenge official government narratives, particularly in Indonesia and India. In China, counter-discourse clusters tend to be smaller and more peripheral due to limitations in public discursive space. These findings demonstrate that political structures and the openness of public space significantly influence the configuration and dynamics of discourse networks surrounding disinformation and foreign intervention in each country.*

Keywords: *Discourse Network Analysis; Discourse Networks; Disinformation; Foreign Intervention; Securitization.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis aktor dan jaringan wacana dalam isu disinformasi dan intervensi asing di Indonesia, India, dan China dengan menggunakan pendekatan *Discourse Network Analysis* (DNA). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktor yang memiliki posisi dominan, memetakan hubungan antaraktor, serta menganalisis perbedaan struktur wacana dalam konteks politik dan ruang publik yang berbeda. Data penelitian terdiri atas 200 artikel berita nasional dan internasional yang membahas disinformasi dan intervensi asing, kemudian dikodekan berdasarkan aktor, isu, dan posisi terhadap klaim wacana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah merupakan aktor paling dominan dan menempati posisi sentral dalam jaringan wacana di ketiga negara. Pemerintah berperan dalam membingkai disinformasi dan intervensi asing sebagai isu keamanan dan ancaman terhadap stabilitas politik serta kedaulatan informasi. Perusahaan teknologi dan media berfungsi sebagai penguat dan perantara penyebaran wacana dengan menghubungkan berbagai kelompok aktor. Sementara itu, masyarakat sipil, akademisi, organisasi pemeriksa fakta, dan media independen membentuk klaster tandingan yang menantang narasi resmi pemerintah, terutama di Indonesia dan India. Di China, klaster tandingan cenderung lebih kecil dan perifer karena keterbatasan ruang diskursif publik. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur politik dan tingkat keterbukaan ruang publik memengaruhi konfigurasi serta dinamika jaringan wacana disinformasi dan intervensi asing di masing-masing negara.

Kata Kunci: *Discourse Network Analysis; Disinformasi; Intervensi Asing; Jaringan Wacana; Sekuritisasi.*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi politik global dengan memungkinkan penyebaran informasi lintas batas dalam waktu yang sangat singkat. Perubahan ini menandai pergeseran dari komunikasi politik yang bersifat terpusat menuju komunikasi berbasis jaringan, di mana interaksi antara aktor negara, aktor non-negara, dan publik berlangsung secara langsung tanpa perantara institusi tradisional. Dalam struktur komunikasi berbasis jaringan tersebut, media sosial menempati posisi strategis sebagai ruang utama pembentukan opini publik karena kemampuannya menghubungkan individu, kelompok, dan

institusi dalam satu ekosistem komunikasi yang terbuka, cepat, dan berskala luas (Castells, 2015).

Karakter media sosial yang terbuka dan minim penyaringan juga menjadikannya wadah yang sangat efektif bagi penyebaran disinformasi, khususnya konten politik yang menyesatkan dan sulit diverifikasi. Studi mengenai dinamika pemilu menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya memfasilitasi pertukaran informasi politik, tetapi juga memperbesar eksposur publik terhadap informasi palsu yang berpotensi memengaruhi preferensi politik dan kepercayaan terhadap proses demokrasi (Allcott & Gentzkow, 2017). Dengan demikian, media sosial berfungsi secara ambivalen dalam komunikasi politik kontemporer, baik sebagai sarana partisipasi politik maupun sebagai kanal utama penyebaran disinformasi lintas batas negara.

Disinformasi terbukti dapat menyebar lebih cepat dan menjangkau audiens yang lebih luas dibandingkan informasi faktual, terutama ketika kontennya bersifat emosional dan politis (Vosoughi, Roy, & Aral, 2018). Karakter ini menjadikan disinformasi sebagai persoalan serius yang berdampak langsung pada stabilitas politik dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Penyebaran disinformasi melalui media digital tidak hanya memengaruhi opini publik, tetapi juga berimplikasi pada legitimasi politik dan kualitas proses demokrasi. Informasi palsu memiliki tingkat difusi yang lebih tinggi dibandingkan informasi yang benar, khususnya ketika dikemas dalam narasi politik yang memicu emosi dan polarisasi (Vosoughi et al., 2018). Kondisi ini meningkatkan risiko manipulasi persepsi publik dan secara simultan memperlemah kepercayaan terhadap media, pemerintah, dan mekanisme demokrasi itu sendiri (Allcott & Gentzkow, 2017). Disinformasi semakin dipahami sebagai instrumen strategis yang dapat dimanfaatkan oleh aktor asing untuk memengaruhi dinamika politik domestik negara lain tanpa keterlibatan militer langsung (Benkler et al., 2018). Oleh karena itu, disinformasi tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan komunikasi, melainkan sebagai tantangan politik dan keamanan yang bersifat lintas batas.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, kajian hubungan internasional memandang disinformasi sebagai bagian dari strategi intervensi asing yang bertujuan membentuk persepsi publik dan memengaruhi proses politik domestik negara target (Benkler et al., 2018). Praktik ini kerap diwujudkan melalui operasi pengaruh (*influence operations*) yang melibatkan aktor negara maupun non-negara untuk membangun narasi strategis melalui media dan platform digital (Bradshaw & Howard, 2019). Ketika disinformasi dikonstruksikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, negara cenderung meresponsnya melalui kebijakan dan narasi keamanan yang menempatkan isu tersebut dalam kerangka ancaman eksistensial. Teori sekuritisasi menjelaskan bahwa suatu isu menjadi ancaman bukan karena sifat objektifnya,

melainkan karena berhasil dibingkai sebagai ancaman melalui wacana yang disampaikan oleh aktor berwenang dan diterima oleh audiens politik (Buzan et al., 1998). Dalam proses ini, wacana memainkan peran sentral dalam menentukan batas antara isu normal dan isu keamanan, sekaligus melegitimasi tindakan luar biasa negara dalam merespons disinformasi dan intervensi asing.

Pembentukan wacana sekuritisasi disinformasi melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, media, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil. Setiap aktor membawa kepentingan, sumber daya, dan posisi yang berbeda dalam mendefinisikan sumber ancaman, tingkat bahaya, serta solusi kebijakan yang dianggap sah (Bennett & Livingston, 2018). Interaksi antaraktor tersebut membentuk pola relasi wacana yang kompleks dan tidak selalu homogen, serta dapat menghasilkan jaringan wacana yang terpusat, terfragmentasi, atau bersifat kompetitif tergantung pada konteks politik dan sistem media suatu negara. Dalam hal ini, China, India, dan Indonesia menghadapi isu disinformasi dan intervensi asing dalam konfigurasi politik dan media yang berbeda. China menunjukkan pola pengelolaan informasi yang relatif terpusat dengan peran negara yang dominan dalam mengendalikan wacana publik (Repnikova, 2017). Sebaliknya, India dan Indonesia sebagai negara demokrasi besar memperlihatkan ruang wacana yang lebih terbuka dan kompetitif, di mana media dan masyarakat sipil berperan lebih aktif dalam membentuk dan menantang narasi dominan (Arayankalam & Krishnan, 2021; Lim, 2017).

Meskipun banyak penelitian telah membahas disinformasi secara normatif dan deskriptif, masih terbatas kajian yang secara sistematis memetakan hubungan antaraktor pembentuk wacana dalam perspektif komparatif lintas negara. *Discourse Network Analysis* (DNA) menawarkan pendekatan empiris yang memungkinkan analisis relasi antara aktor dan klaim wacana dalam bentuk jaringan, sehingga dapat mengungkap struktur relasi, tingkat dominasi aktor, dan fragmentasi wacana secara lebih terukur (Leifeld, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana aktor pemerintah, perusahaan teknologi, media, dan masyarakat sipil membentuk wacana disinformasi dan intervensi asing di China, India, dan Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya kajian hubungan internasional dengan memberikan pemahaman empiris mengenai konstruksi makna, dinamika aktor, dan proses sekuritisasi disinformasi dalam konteks global kontemporer.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Disinformasi dan Intervensi Asing dalam Hubungan Internasional

Dalam kajian hubungan internasional kontemporer, disinformasi dipahami sebagai penyebaran informasi yang secara sengaja menyesatkan dengan tujuan memengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku politik audiens tertentu. Disinformasi tidak berdiri sebagai fenomena domestik semata, tetapi berkembang sebagai instrumen strategis dalam interaksi antarnegara, terutama melalui ruang digital yang bersifat lintas batas (Benkler et al., 2018). Praktik ini sering dikaitkan dengan intervensi asing non-militer yang memanfaatkan media dan platform digital untuk memengaruhi dinamika politik internal negara lain tanpa keterlibatan kekuatan bersenjata secara langsung (Bradshaw & Howard, 2019).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa disinformasi menjadi bagian dari *influence operations* yang bertujuan membangun narasi strategis, melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta menciptakan polarisasi sosial (Bennett & Livingston, 2018). Dalam konteks ini, disinformasi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan dalam persaingan politik global.

Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional

Konstruktivisme menekankan bahwa realitas politik internasional tidak bersifat objektif dan tetap, melainkan dibentuk melalui interaksi sosial, norma, identitas, dan wacana (Wendt, 1999). Menurut pendekatan ini, makna ancaman, kepentingan nasional, dan keamanan tidak hadir secara alami, tetapi dikonstruksikan melalui proses diskursif yang melibatkan aktor-aktor politik.

Dalam konteks disinformasi, konstruktivisme memungkinkan analisis terhadap bagaimana aktor negara dan non-negara membingkai fenomena tertentu sebagai ancaman atau risiko politik. Cara aktor berbicara tentang disinformasi, intervensi asing, dan keamanan digital membentuk pemahaman kolektif mengenai siapa yang dianggap sebagai ancaman dan tindakan apa yang dianggap sah untuk diambil (Adler, 2013). Dengan demikian, fokus utama konstruktivisme bukan pada materialitas ancaman, tetapi pada proses pembentukan makna melalui wacana.

Teori Sekuritisasi

Teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh *Copenhagen School* menjelaskan bagaimana suatu isu dapat diangkat dari ranah politik normal menjadi isu keamanan melalui proses diskursif (Buzan et al., 1998). Dalam kerangka ini, suatu isu menjadi ancaman bukan karena sifat objektifnya, tetapi karena berhasil dipresentasikan sebagai ancaman eksistensial oleh aktor berwenang dan diterima oleh *audiens* yang relevan.

Disinformasi dalam banyak negara telah mengalami proses sekuritisasi, terutama ketika dikaitkan dengan ancaman terhadap kedaulatan, stabilitas politik, dan keamanan nasional. Pemerintah sering menggunakan narasi keamanan untuk membenarkan kebijakan penguatan regulasi media, pengawasan digital, atau pembatasan platform daring (Bennett & Livingston, 2018). Teori sekuritisasi membantu menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut memperoleh legitimasi melalui wacana ancaman, bukan semata-mata melalui bukti empiris tentang bahaya disinformasi.

Aktor dan Wacana dalam Proses Sekuritisasi

Proses sekuritisasi tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai *securitizing actor*, tetapi juga aktor lain seperti media, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil. Media berperan dalam memperkuat atau menantang framing ancaman, sementara perusahaan teknologi memengaruhi wacana melalui kebijakan moderasi konten dan algoritma distribusi informasi (Gillespie, 2018). Masyarakat sipil dan organisasi pemeriksa fakta turut membentuk wacana alternatif yang dapat mendukung atau menentang proses sekuritisasi.

Interaksi antaraktor tersebut menghasilkan konfigurasi wacana yang berbeda di setiap negara. Dalam sistem politik yang terpusat, proses sekuritisasi cenderung menghasilkan wacana yang lebih homogen, sementara dalam sistem demokratis, wacana keamanan sering diperdebatkan secara terbuka dan kompetitif (Bennett & Livingston, 2018).

Discourse Network Analysis (DNA) sebagai Pendekatan Analitis

Discourse Network Analysis merupakan pendekatan metodologis yang menggabungkan analisis wacana dengan analisis jaringan untuk memetakan hubungan antara aktor dan klaim dalam suatu isu kebijakan (Leifeld, 2017). DNA memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi aktor yang paling dominan, pola koalisi, serta tingkat fragmentasi wacana secara sistematis dan terukur.

Dalam konteks konstruktivisme dan teori sekuritisasi, DNA relevan karena mampu menangkap proses pembentukan makna dan relasi kekuasaan melalui wacana. Dengan memetakan siapa mengatakan apa dan bagaimana aktor saling terhubung dalam jaringan wacana, DNA memberikan bukti empiris terhadap proses konstruksi ancaman dan sekuritisasi disinformasi.

Kerangka Teoretis Penelitian

Berdasarkan konstruktivisme dan teori sekuritisasi, penelitian ini memandang disinformasi dan intervensi asing sebagai fenomena yang maknanya dibentuk melalui interaksi wacana antaraktor. Aktor yang memiliki posisi sentral dalam jaringan wacana memiliki pengaruh lebih besar dalam mendefinisikan ancaman dan menentukan respons kebijakan. Oleh

karena itu, perbedaan struktur jaringan wacana di China, India, dan Indonesia dipahami sebagai refleksi dari konteks politik dan sistem media yang berbeda di masing-masing negara.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pendekatan konstruktivisme dan teori sekuritisasi, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa makna disinformasi dan intervensi asing dibentuk melalui wacana yang diproduksi dan dipertukarkan oleh aktor-aktor politik. Posisi aktor dalam jaringan wacana menentukan tingkat pengaruhnya dalam mendefinisikan ancaman dan membentuk respons kebijakan.

Hipotesis 1 (H1): Dominasi Aktor

Aktor pemerintah memiliki posisi paling sentral dalam jaringan wacana disinformasi dan intervensi asing dibandingkan aktor media, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil. Dasar teori: Konstruktivisme menekankan peran aktor dominan dalam membentuk makna, sementara teori sekuritisasi menempatkan pemerintah sebagai *securitizing actor* utama (Wendt, 1999; Buzan et al., 1998). Implikasi DNA: Diuji melalui degree centrality dan betweenness centrality aktor pemerintah.

Hipotesis 2 (H2): Struktur Jaringan dan Konteks Politik.

Struktur jaringan wacana disinformasi dan intervensi asing berbeda antarnegara, dengan jaringan yang lebih terpusat di China dan lebih terfragmentasi di India dan Indonesia. Dasar teori: Teori sekuritisasi menunjukkan bahwa sistem politik yang terpusat cenderung menghasilkan wacana yang lebih terkonsolidasi, sementara sistem yang lebih terbuka memungkinkan kontestasi wacana (Bennett & Livingston, 2018). Diuji melalui network centralization, density, dan modularity per negara.

Hipotesis 3 (H3): Sekuritisasi Klaim

Klaim yang membingkai disinformasi sebagai ancaman keamanan lebih sering dikemukakan oleh aktor pemerintah dibandingkan aktor non-negara. Teori sekuritisasi menekankan bahwa framing ancaman keamanan terutama diproduksi oleh aktor berwenang untuk memperoleh legitimasi kebijakan (Buzan et al., 1998). Diuji melalui frekuensi klaim keamanan yang dikaitkan dengan kategori aktor pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan analisis jaringan wacana untuk memetakan aktor dan hubungan diskursif dalam isu disinformasi dan intervensi asing di China, India, dan Indonesia (Leifeld, 2017). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengintegrasikan analisis teks dan struktur relasional

aktor secara simultan dalam satu kerangka analisis (Leifeld & Haunss, 2012). Penelitian berfokus pada bagaimana aktor membentuk wacana dan berinteraksi dalam jaringan diskursif, bukan pada pengukuran opini individu (Blei, 2012).

Data penelitian terdiri dari dokumen teks publik yang berasal dari berita nasional dan internasional, pernyataan resmi pemerintah, publikasi perusahaan teknologi, serta rilis organisasi masyarakat sipil dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2015–2025) (Neuendorf, 2017). Sumber data dipilih berdasarkan kriteria kredibilitas media, relevansi isu, dan keterlacakan aktor, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Krippendorff, 2019). Unit analisis dalam penelitian ini adalah pernyataan aktor (*actor statements*) yang mengandung posisi eksplisit mengenai disinformasi dan intervensi asing (Leifeld, 2013).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis dokumen digital menggunakan kata kunci yang relevan dengan disinformasi, intervensi asing, keamanan informasi, dan kedaulatan digital di masing-masing negara (Boettcher & Cobb, 2019). Setiap dokumen diseleksi berdasarkan keterlibatan aktor dan keberadaan klaim atau sikap yang dapat dikodekan dalam jaringan wacana (Haunss & Leifeld, 2020). Dokumen yang memenuhi kriteria kemudian dikonversi ke dalam format tabular untuk keperluan pengkodean dalam perangkat lunak *Discourse Network Analyzer* (Leifeld, 2017).

Pengodean data dilakukan secara manual dengan mengikuti skema standar Discourse Network Analysis, yang mencakup aktor, isu, dan posisi (Leifeld, 2016). Aktor diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yaitu pemerintah, perusahaan teknologi, masyarakat sipil, dan media, untuk menjaga konsistensi analisis lintas negara (Bennett & Checkel, 2015). Posisi aktor dikodekan sebagai mendukung, menolak, atau netral terhadap narasi disinformasi dan intervensi asing berdasarkan isi pernyataan (Krippendorff, 2019). Proses pengodean dilakukan secara konsisten untuk memastikan replikabilitas dan reliabilitas hasil penelitian (Neuendorf, 2017).

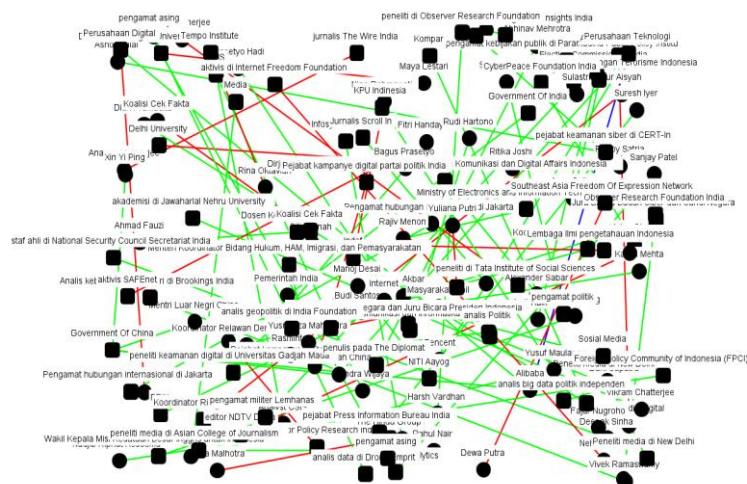
Analisis data dilakukan menggunakan *Discourse Network Analyzer* (DNA) untuk memetakan hubungan antaraktor berdasarkan kesamaan atau perbedaan posisi wacana (Leifeld, 2017). DNA memungkinkan visualisasi jaringan aktor–isu sehingga pola koalisi, oposisi, dan dominasi aktor dapat diidentifikasi secara sistematis (Leifeld & Haunss, 2012). Jaringan wacana dianalisis dengan melihat tingkat sentralitas aktor, yang menunjukkan aktor paling aktif dan berpengaruh dalam membentuk narasi disinformasi (Wasserman & Faust, 1994). Perbandingan jaringan antarnegara dilakukan untuk mengidentifikasi variasi struktur diskursus dan konfigurasi aktor di China, India, dan Indonesia (Bennett & Checkel, 2015).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan *Discourse Network Analysis* (DNA) sebagai pendekatan metodologis utama untuk memetakan aktor, posisi, dan relasi wacana dalam isu disinformasi dan intervensi asing di Indonesia, India, dan China. DNA merupakan metode yang menggabungkan analisis wacana kualitatif dengan analisis jaringan kuantitatif untuk menangkap bagaimana aktor menyampaikan klaim tertentu dan bagaimana klaim tersebut saling terhubung dalam ruang publik. Metode ini dikembangkan oleh Leifeld & Haunss (2012) serta Leifeld (2017) untuk menganalisis perdebatan kebijakan publik secara sistematis melalui teks media, pidato, dan dokumen resmi. DNA memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola koalisi, konflik, dan sentralitas aktor dalam suatu isu kebijakan yang kompleks.

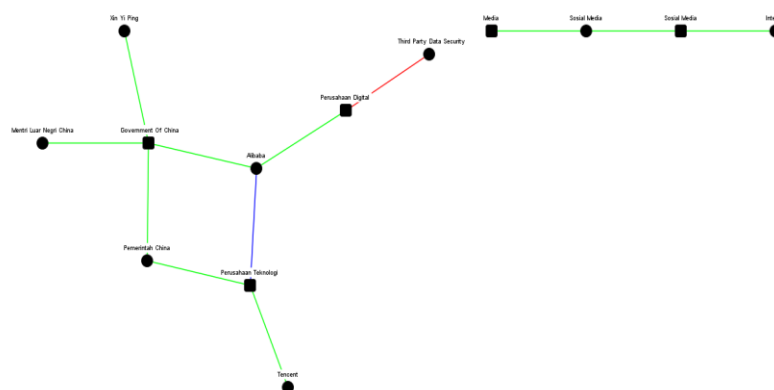
Dalam penelitian ini, DNA diterapkan pada 200 artikel berita yang dipublikasikan oleh media nasional dan internasional bereputasi selama periode pengamatan tertentu. Artikel dipilih melalui proses seleksi sistematis berdasarkan relevansi isu disinformasi dan intervensi asing, dengan fokus pada konteks politik dan keamanan informasi di Indonesia, India, dan China. Setiap artikel dikodekan secara manual menggunakan skema DNA yang mencakup identifikasi aktor (individu dan organisasi), afiliasi institusional, isu yang dibahas, serta posisi aktor terhadap isu tersebut (setuju, tidak setuju, atau netral). Pendekatan ini sejalan dengan praktik DNA yang menekankan transparansi coding dan keterlacakan klaim aktor dalam teks media (Leifeld, 2013; Eriyanto & Ali, 2020).

Hasil coding kemudian dianalisis menggunakan analisis jaringan untuk memetakan hubungan antaraktor berdasarkan kesamaan posisi dan isu yang diangkat. Jaringan wacana yang dihasilkan menggambarkan struktur interaksi diskursif, termasuk aktor yang paling sentral, pola koalisi lintas sektor, serta dinamika konflik naratif antara pemerintah, perusahaan teknologi, masyarakat sipil, dan media. Pendekatan DNA dipilih karena terbukti efektif dalam mengungkap bagaimana isu disinformasi dikonstruksi secara politik dan bagaimana narasi keamanan, kedaulatan informasi, dan intervensi asing diperebutkan di ruang publik (Leifeld & Haunss, 2012; Putra, 2024). Dengan demikian, metode ini memberikan dasar empiris yang kuat untuk menjawab hipotesis penelitian mengenai aktor dominan dan relasi wacana dalam isu disinformasi di ketiga negara.



Gambar 1. Peta DNA.

Sumber: Diolah Penulis 2026.



Gambar 2. Jaring-jaring DNA.

Sumber: Diolah Penulis 2026.

Hipotesis 1: Pemerintah merupakan aktor paling dominan dalam membentuk wacana disinformasi dan intervensi asing di Indonesia, India, dan China.

Gambar jaring-jaring menunjukkan bahwa node pemerintah dan pejabat negara menempati posisi paling sentral dalam jaringan. Hal ini terlihat dari jumlah koneksi (degree centrality) yang tinggi dan kedekatan mereka dengan berbagai aktor lain, seperti media, perusahaan teknologi, dan lembaga keamanan siber. Di Indonesia, simpul yang terhubung dengan Kementerian Komunikasi, lembaga keamanan, dan pejabat publik memiliki hubungan lintas sektor yang padat. Di India, kementerian teknologi dan lembaga pemilu membentuk klaster besar yang terhubung dengan media nasional. Di China, aktor pemerintah dan media yang berafiliasi negara berada di pusat jaringan tanpa banyak simpul tandingan. Pola ini

menunjukkan bahwa narasi utama tentang disinformasi dan intervensi asing dikendalikan oleh negara, sehingga hipotesis pertama terdukung secara empiris oleh struktur jaringan.

Dominasi aktor pemerintah dalam jaringan wacana ini dapat dijelaskan secara teoritis melalui konstruktivisme dan teori sekuritisasi. Dalam perspektif konstruktivisme, realitas ancaman seperti disinformasi dan intervensi asing tidak bersifat objektif semata, tetapi dibentuk melalui proses interaksi sosial dan produksi makna oleh aktor yang memiliki otoritas simbolik, terutama negara. Pemerintah, melalui pejabat publik dan institusi resminya, memiliki kapasitas diskursif untuk mendefinisikan apa yang dianggap sebagai “ancaman”, siapa pelakunya, dan bagaimana publik harus memahaminya. Posisi sentral node pemerintah dalam hasil *Discourse Network Analysis* menunjukkan bahwa negara berperan sebagai *primary meaning maker* yang secara aktif membingkai disinformasi dan intervensi asing sebagai isu strategis, sebagaimana dijelaskan oleh Wendt (1999); Adler (2013) dalam konstruktivisme hubungan internasional.

Temuan jaringan ini juga selaras dengan teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Buzan, Wæver & de Wilde (1998). Teori ini menekankan bahwa suatu isu menjadi isu keamanan bukan karena sifat inherennya, tetapi karena aktor berwenang terutama pemerintah berhasil melakukan *speech act* yang mengonstruksinya sebagai ancaman eksistensial. Dalam konteks Indonesia, India, dan China, simpul pemerintah yang memiliki degree centrality tinggi mencerminkan keberhasilan negara dalam melakukan sekuritisasi disinformasi melalui pernyataan resmi, regulasi digital, dan kerja sama dengan media arus utama. DNA memperlihatkan bahwa klaim pemerintah tentang ancaman asing terhubung langsung dengan aktor media dan lembaga keamanan siber, yang memperluas legitimasi narasi keamanan tersebut di ruang publik.

Dengan menggunakan *Discourse Network Analyser*, analisis ini tidak hanya mengidentifikasi aktor dominan secara deskriptif, tetapi juga menunjukkan bagaimana proses konstruksi dan sekuritisasi wacana berlangsung secara empiris melalui relasi jaringan. Struktur jaringan yang terkonsentrasi pada aktor negara mengindikasikan bahwa pemerintah berhasil memonopoli definisi masalah dan solusi terkait disinformasi dan intervensi asing. Hal ini memperkuat dukungan empiris terhadap hipotesis pertama, sekaligus menunjukkan bahwa dominasi pemerintah dalam jaringan wacana bukan sekadar hasil kekuasaan material, tetapi juga hasil keberhasilan negara dalam membentuk makna dan legitimasi diskursif, sebagaimana diteorikan dalam konstruktivisme dan teori sekuritisasi (Buzan et al., 1998; Wendt, 1999).

Hipotesis 2 : Perusahaan teknologi dan media berperan sebagai penguat dan perantara utama penyebaran wacana disinformasi dan intervensi asing.

Dalam gambar jaringan, perusahaan teknologi dan media berada pada posisi penghubung (broker) antara pemerintah dan aktor non-negara. Hal ini terlihat dari banyaknya garis hubungan silang yang menghubungkan simpul teknologi dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi. Warna hubungan yang beragam menunjukkan bahwa aktor ini menyuarakan klaim yang sejalan sekaligus berseberangan dengan pemerintah. Media dan platform digital tidak menjadi pusat ideologis, tetapi menjadi infrastruktur diskursif yang memperluas jangkauan narasi. Posisi struktural ini memperkuat hipotesis kedua bahwa teknologi dan media berfungsi sebagai amplifier dan mediator wacana, bukan aktor normatif utama.

Peran perusahaan teknologi dan media sebagai *broker* dalam jaringan wacana ini dapat dijelaskan melalui teori mediasi komunikasi politik dan teori platformisasi (*platformization of communication*). Dalam teori mediasi, media dipahami bukan sekadar saluran pasif, tetapi aktor struktural yang menentukan visibilitas, intensitas, dan arah penyebaran wacana politik melalui proses seleksi, fr

aming, dan amplifikasi pesan. Posisi perusahaan teknologi dan media pada simpul penghubung dalam hasil *Discourse Network Analysis* menunjukkan bahwa mereka berfungsi sebagai *gatekeeper* yang mengatur arus narasi antara pemerintah dan aktor non-negara, sebagaimana dijelaskan oleh Strömbäck (2008); Couldry & Hepp (2017) dalam studi komunikasi politik dan media digital.

Temuan ini juga selaras dengan teori platformisasi, yang menekankan bahwa platform digital memiliki kekuatan struktural dalam membentuk ruang publik melalui algoritma, kebijakan moderasi konten, dan desain arsitektur komunikasi. Dalam konteks disinformasi dan intervensi asing, perusahaan teknologi tidak selalu memproduksi klaim normatif sendiri, tetapi memperkuat atau melemahkan klaim aktor lain melalui mekanisme distribusi konten. DNA menunjukkan bahwa simpul teknologi memiliki koneksi silang yang tinggi dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi, menandakan peran mereka sebagai *infrastructure of discourse* yang memperluas jangkauan narasi sekuritisasi maupun kritik terhadapnya. Pola ini konsisten dengan argumen van Dijck et al. (2018) bahwa platform digital beroperasi sebagai aktor institusional yang memediasi relasi kuasa dalam ruang publik.

Selain itu, perspektif teori agenda-setting dan networked gatekeeping membantu menjelaskan mengapa media dan platform tidak muncul sebagai pusat ideologis, tetapi tetap memiliki pengaruh tinggi dalam jaringan. Agenda-setting menjelaskan bagaimana media menentukan isu mana yang dianggap penting, sementara *networked gatekeeping* menekankan bahwa kontrol informasi dalam ekosistem digital bersifat terdistribusi antara media, platform,

dan pengguna. Posisi struktural perusahaan teknologi dan media dalam jaringan DNA menunjukkan bahwa mereka menghubungkan berbagai klaster wacana tanpa sepenuhnya mengendalikan isi normatifnya. Dengan demikian, hasil analisis ini memberikan dukungan teoretis dan empiris terhadap hipotesis kedua bahwa perusahaan teknologi dan media berfungsi sebagai penguat dan perantara utama penyebaran wacana, bukan sebagai aktor normatif dominan (van Dijck et al., 2018).

Hipotesis 3: Masyarakat sipil dan media independen membentuk klaster tandingan yang menantang narasi resmi pemerintah.

Gambar jaringan memperlihatkan klaster terpisah namun saling terhubung yang terdiri dari LSM, akademisi, jurnalis independen, dan organisasi pemeriksa fakta. Klaster ini ditandai oleh hubungan internal yang kuat serta hubungan konflik (garis berbeda warna) dengan simpul pemerintah. Di Indonesia dan India, klaster ini terlihat lebih aktif dan terhubung lintas isu, menunjukkan adanya counter-discourse terhadap narasi keamanan nasional dan klaim intervensi asing. Sebaliknya, di China klaster tandingan jauh lebih kecil dan perifer. Struktur ini menunjukkan bahwa kontestasi wacana benar-benar terjadi, sehingga hipotesis ketiga didukung oleh konfigurasi jaringan yang menunjukkan oposisi dan fragmentasi diskursif.

Keberadaan klaster tandingan yang dibentuk oleh masyarakat sipil dan media independen dalam jaringan wacana dapat dijelaskan melalui teori ruang publik kritis, konstruktivisme diskursif, dan teori counter-discourse. Dalam perspektif ruang publik, Habermas (1989) menegaskan bahwa masyarakat sipil berfungsi sebagai arena produksi wacana kritis yang dapat menantang dominasi negara dan kekuasaan institusional. Klaster LSM, akademisi, jurnalis independen, dan organisasi pemeriksa fakta yang terlihat memiliki ikatan internal kuat dalam hasil *Discourse Network Analysis* mencerminkan peran mereka sebagai aktor ruang publik yang berupaya menjaga pluralitas makna dan rasionalitas komunikasi ketika negara memonopoli definisi ancaman disinformasi dan intervensi asing.

Temuan ini juga sejalan dengan konstruktivisme diskursif, yang memandang wacana sebagai arena kontestasi makna antara aktor dengan kepentingan dan sumber daya simbolik yang berbeda. Dalam kerangka ini, masyarakat sipil tidak sekadar bereaksi terhadap narasi negara, tetapi secara aktif membangun *counter-frames* untuk mendekonstruksi klaim keamanan yang dianggap berlebihan atau politis. Hubungan konflik yang terlihat jelas antara klaster masyarakat sipil dan simpul pemerintah dalam jaringan DNA menunjukkan adanya pertarungan definisi tentang apa yang disebut disinformasi, siapa aktor asing yang dimaksud, dan implikasinya terhadap kebebasan sipil. Pola ini konsisten dengan argumen Dryzek (2013)

bahwa demokrasi deliberatif modern ditandai oleh pluralitas diskursus yang saling berkompetisi, bukan oleh konsensus tunggal yang dipaksakan oleh negara.

Selain itu, teori counter-discourse dan power-knowledge dari Foucault membantu menjelaskan mengapa klaster tandingan ini muncul lebih kuat di Indonesia dan India, tetapi bersifat perifer di China. Foucault (1980) menekankan bahwa di mana ada kekuasaan, di situ selalu ada perlawanan diskursif, namun intensitas dan visibilitasnya sangat bergantung pada struktur politik dan kontrol informasi. Dalam sistem yang relatif lebih terbuka seperti Indonesia dan India, masyarakat sipil memiliki ruang institusional dan media untuk memproduksi wacana alternatif, sehingga klaster tandingan tampak aktif dan terhubung lintas isu. Sebaliknya, dalam konteks China yang lebih terkontrol, klaster ini terdorong ke pinggiran jaringan, bukan karena tidak ada kontestasi, tetapi karena akses terhadap ruang diskursif publik dibatasi. Dengan demikian, konfigurasi jaringan DNA memberikan dukungan teoretis dan empiris yang kuat terhadap hipotesis ketiga bahwa masyarakat sipil dan media independen berfungsi sebagai sumber oposisi dan fragmentasi diskursif terhadap narasi resmi pemerintah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa wacana disinformasi dan intervensi asing di Indonesia, India, dan China dibentuk melalui struktur jaringan diskursif yang hierarkis dan kompetitif. Berdasarkan analisis terhadap 200 artikel berita menggunakan Discourse Network Analysis, pemerintah terbukti sebagai aktor paling dominan dalam membingkai isu disinformasi dan intervensi asing. Dominasi ini tercermin dari posisi sentral aktor negara dalam jaringan, tingginya tingkat keterhubungan dengan aktor lain, serta kemampuannya mendefinisikan isu sebagai ancaman keamanan. Temuan ini menunjukkan bahwa proses sekuritisasi berjalan efektif melalui media dan institusi resmi, sehingga negara berperan sebagai produsen makna utama dalam wacana publik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perusahaan teknologi dan media tidak berfungsi sebagai aktor normatif utama, tetapi berperan sebagai penguat dan perantara penyebaran wacana. Posisi mereka sebagai *broker* dalam jaringan memperlihatkan kemampuan struktural untuk memperluas, memodulasi, dan menghubungkan klaim dari berbagai aktor. Peran ini menjadikan platform digital dan media sebagai infrastruktur diskursif yang krusial dalam penyebaran narasi keamanan maupun kritik terhadapnya, tanpa sepenuhnya mengendalikan isi ideologis wacana tersebut.

Selain itu, masyarakat sipil dan media independen terbukti membentuk klaster tandingan yang menantang narasi resmi pemerintah, terutama di Indonesia dan India. Klaster

ini berfungsi sebagai sumber *counter-discourse* yang memperkaya kontestasi makna dan mencegah monopoli wacana oleh negara. Sebaliknya, dalam konteks China, kluster tandingan cenderung perifer karena keterbatasan ruang diskursif publik. Temuan ini menegaskan bahwa dinamika wacana disinformasi sangat dipengaruhi oleh struktur politik dan tingkat keterbukaan ruang publik di masing-masing negara.

Secara teoretis, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan *Discourse Network Analysis* dengan pendekatan lain seperti analisis framing atau analisis sentimen berbasis komputasi agar dapat menangkap dimensi emosional dan ideologis wacana secara lebih mendalam. Penambahan dimensi temporal juga penting untuk melihat perubahan struktur jaringan dan pergeseran posisi aktor dari waktu ke waktu, terutama menjelang peristiwa politik penting seperti pemilu atau krisis keamanan.

Secara metodologis, penelitian ke depan perlu memperluas sumber data tidak hanya dari media berita, tetapi juga dari media sosial, pernyataan resmi pemerintah, dan dokumen kebijakan. Hal ini akan meningkatkan validitas eksternal temuan dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai ekosistem disinformasi dan intervensi asing. Penggunaan *intercoder reliability* juga direkomendasikan untuk memperkuat konsistensi dan replikasi proses coding DNA.

Secara praktis, pemerintah disarankan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dalam menangani disinformasi dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi pemeriksa fakta sebagai mitra strategis, bukan sekadar objek regulasi. Perusahaan teknologi perlu meningkatkan transparansi algoritma dan mekanisme moderasi konten untuk mengurangi risiko amplifikasi disinformasi. Sementara itu, penguatan kapasitas media independen dan literasi digital publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa penanganan disinformasi tidak berujung pada pembatasan berlebihan terhadap kebebasan berekspresi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, E. (2013). *Constructivism in international relations: Sources, contributions, and debates*. Routledge. <https://doi.org/10.4135/9781446247587.n5>
- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211–236. <https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211>
- Arayankalam, J., & Krishnan, S. (2021). Foreign disinformation, social media, and offline violence: An agenda-building perspective. *Technological Forecasting and Social Change*, 166, 120617. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120661>
- Balzacq, T. (2011). *Securitization theory: How security problems emerge and dissolve*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203868508>

- Benkler, Y., Faris, R., & Roberts, H. (2018). *Network propaganda: Manipulation, disinformation, and radicalization in American politics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190923624.001.0001>
- Bennett, A., & Checkel, J. T. (2015). *Process tracing: From metaphor to analytic tool*. Cambridge University Press.
- Bennett, W. L., & Livingston, S. (2018). The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions. *European Journal of Communication*, 33(2), 122–139. <https://doi.org/10.1177/0267323118760317>
- Blei, D. M. (2012). Probabilistic topic models. *Communications of the ACM*, 55(4), 77–84. <https://doi.org/10.1145/2133806.2133826>
- Boettcher, W. A., & Cobb, M. D. (2019). *Theories of international relations*. Oxford University Press.
- Bradshaw, S., & Howard, P. N. (2019). *The global disinformation order: 2019 global inventory of organised social media manipulation*. Oxford Internet Institute.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers. <https://doi.org/10.1515/9781685853808>
- Castells, M. (2015). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. Polity Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage.
- Dryzek, J. S. (2013). *The politics of the earth: Environmental discourses* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Eriyanto, & Ali, D. J. (2020). *Discourse network analysis dalam studi kebijakan publik*.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977*. Pantheon Books.
- Gillespie, T. (2018). *Custodians of the Internet: Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media*. Yale University Press. <https://doi.org/10.12987/9780300235029>
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.
- Haunss, S., & Leifeld, P. (2020). Network analysis and political discourse. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.954>
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Leifeld, P. (2013). Reconceptualizing major policy change in the advocacy coalition framework: A discourse network analysis of German pension politics. *Policy Studies Journal*, 41(3), 405–430. <https://doi.org/10.1111/psj.12007>
- Leifeld, P. (2016). Discourse network analysis: Policy debates as dynamic networks. In J. N. Victor, A. H. Montgomery, & M. Lubell (Eds.), *The Oxford handbook of political networks*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190228217.013.25>

- Leifeld, P., & Haunss, S. (2012). Political discourse networks and conflict over software patents in Europe. *European Journal of Political Research*, 51(3), 382–409. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2011.02003.x>
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- McDonald, M. (2008). Securitization and the construction of security. *European Journal of International Relations*, 14(4), 563–587. <https://doi.org/10.1177/1354066108097553>
- Neuendorf, K. A. (2017). *The content analysis guidebook* (2nd ed.). Sage. <https://doi.org/10.4135/9781071873045>
- Putra, B. A. (2024). Fake news and disinformation in Southeast Asia. *Frontiers in Communication*, 9. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2024.1380944>
- Repnikova, M. (2017). *Media politics in China: Improvising power under authoritarianism*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108164474>
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Wasserman, S., & Faust, K. (1994). *Social network analysis: Methods and applications*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511815478>
- Wendt, A. (1999). *Social theory of international politics*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511612183>